

Irjen Pol Drs Suprpto

INGIN MEMULIAKAN

TENANG dan berwibawa. Begitulah kesan yang terlihat saat kali pertama bertemu Irjen Pol Drs. Suprpto Gubernur PTIK yang baru. Berbagai bidang fungsi sudah dijalani lulusan Akpol 1975 ini, mulai dari Lalu-lintas, Samapta, hingga Reserse. Toh perjalanan karir akhirnya selalu membawanya di tempat tugas yang berhubungan dengan pendidikan dan Sumber Daya Manusia.

Kebetulan? Entahlah, namun jiwa seorang pendidik yang tertanam dalam dirinya pastilah punya peran besar yang menyebabkan begitu seringnya ayah dari tiga anak ini mengemban tugas di bidang pendidikan dan SDM. Apalagi hasil psikotes yang pernah ia jalani juga menunjukkan bahwa Suprpto sangat cocok di bidang tersebut. "Di Polri terdapat dua bidang penugasan yaitu Binkam dan Gakkum, dan kebetulan basic saya dari Binkam," ungkapnya.

"Saya pernah menjabat menjadi Kapolsek sebelum melanjutkan di PTIK dan selesai tahun 1984. Setelah itu saya ditugaskan di

Polda Jawa Tengah sebagai Kapuskodal Polres, sebentar hanya 6 bulan. Dari situ saya ditugaskan di Timor-timor selaku Wakapolres Los alos, mulai awal 1985 hingga pertengahan 1987. Lalu, masih pada tahun yang sama, dari Timor-timor saya dipercaya sebagai wakapolres di Jawa Tengah sampai akhir 1987. Awal tahun 1988 saya ditugaskan di Mabes Polri, di lingkungan SDM, dan sejak itu saya banyak diarahkan ke bidang SDM," papar Suprpto yang senang dengan hal-hal berbau petualangan.

Faktanya, Suprpto memang memiliki 'jam terbang' yang tinggi dalam dunia pendidikan dan SDM. Lima kali ia bolak-balik ditarik Mabes Polri untuk ditempatkan di bagian yang erat kaitannya dengan pendidikan dan pembinaan, hingga akhirnya dipercaya mengemban tugas sebagai Gubernur PTIK dalam dua bulan terakhir ini.



Irjen Pol Drs Suprpto, Gubernur PTIK

FOTO : JT/EVA HARTINI

FUNGSI KEPOLISIAN

MELAKUKAN perubahan! Itulah yang pertama kali ada dalam benak Suprapto saat ia diberi kepercayaan untuk menduduki jabatan Gubernur PTIK. Dengan misi yang jelas, Suprapto mengaku ingin mengubah paradigma yang ada terlebih dahulu. Ia ingin menjadikan polisi yang ada saat ini sebagai polisi yang berwatak sipil. "Hal ini harus ditanamkan ke setiap siswa dari setiap strata pendidikan," tegasnya.

Paradigma seperti itu, menurut Suprapto, sebetulnya bukan baru ia coba wujudkan di PTIK. "Sejak bertugas di Lemdiklat itupun sudah kita lakukan. Setelah kita mengubah paradigma, lalu kita rumuskan ke dalam kurikulum, dalam penga-suhan bersama-sama di bawah bimbingan Pak Tanto (saat ini kapolri, *red*). Begitu pula setelah masuk sespati, kita ubah bersama-sama dengan Kasespim dan bersama-sama Widya Iswara yang lain. Dengan tekad dan kesepakatan bersama, syukurlah semua berjalan lancar. Makanya, setelah di PTIK ini pun saya punya gagasan dan cita-cita untuk mengoperasionalkan paradigma polisi berwatak sipil kepada para mahasiswa PTIK."

Suprapto mengaku beruntung datang di PTIK saat lembaga ini memang sudah menerapkan visi dan misi yang sudah mengarah ke paradigma polisi yang berwatak sipil. Yang perlu dilakukan, lanjutnya, adalah melakukan tekanan-tekanan yang lebih jelas. "Visi PTIK sekarang adalah mewujudkan lem-

baga pendidikan yang mampu menyelenggarakan pendidikan. Kedua, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian, agar mampu menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi-fungsi kepolisian dan juga pemuliaan fungsi kepolisian untuk kepentingan masyarakat," paparnya.

Dari visi itu, misinya antara lain, adalah menyelenggarakan pendidikan sarjana dan diploma dan pendidikan-pendidikan lain yang dibebankan oleh Mabes Polri. Kedua adalah menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian. Yang ketiga adalah mengadakan pengkajian masalah-masalah aktual yang terjadi di kepolisian dengan tujuan memberikan rekomendasi kepada pimpinan Polri bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut. Seperti masalah Poso, Sampit, mahasiswa PTIK bersama dengan UI langsung berangkat ke sana untuk menyelenggarakan penelitian.

Misi PTIK lainnya adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang telah menjadi bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi. Bentuknya adalah dalam wujud nyata sebagai tenaga-tenaga penyuluh, tenaga-tenaga pembina, tenaga-tenaga yang menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai hal, termasuk tentang narkoba. Bentuk lainnya berupa tulisan-tulisan yang dipublikasikan, ada jurnal, polmas, website yang saat ini masih baru dibangun dan disempurnakan. Ini semua

merupakan bentuk bakti terhadap masyarakat.

Dan, mempromosikan ilmu kepolisian itu sendiri menjadi misi kelima PTIK. Kita punya keinginan, bahwa ilmu kepolisian berkembang di Indonesia. Sebetulnya PTIK yang didirikan tahun 1953 sangat menginginkan agar perguruan tinggi umum juga melaksanakan studi ilmu kepolisian, namun faktanya hingga sekarang ini belum ada yang melakukannya. "Padahal, di negara-negara maju hal ini sudah dilakukan. Di Amerika misalnya, sudah banyak sekali perguruan tinggi umum yang menyajikan *police science, police collage*. Banyak sekali, malah sampai jenjang S3."

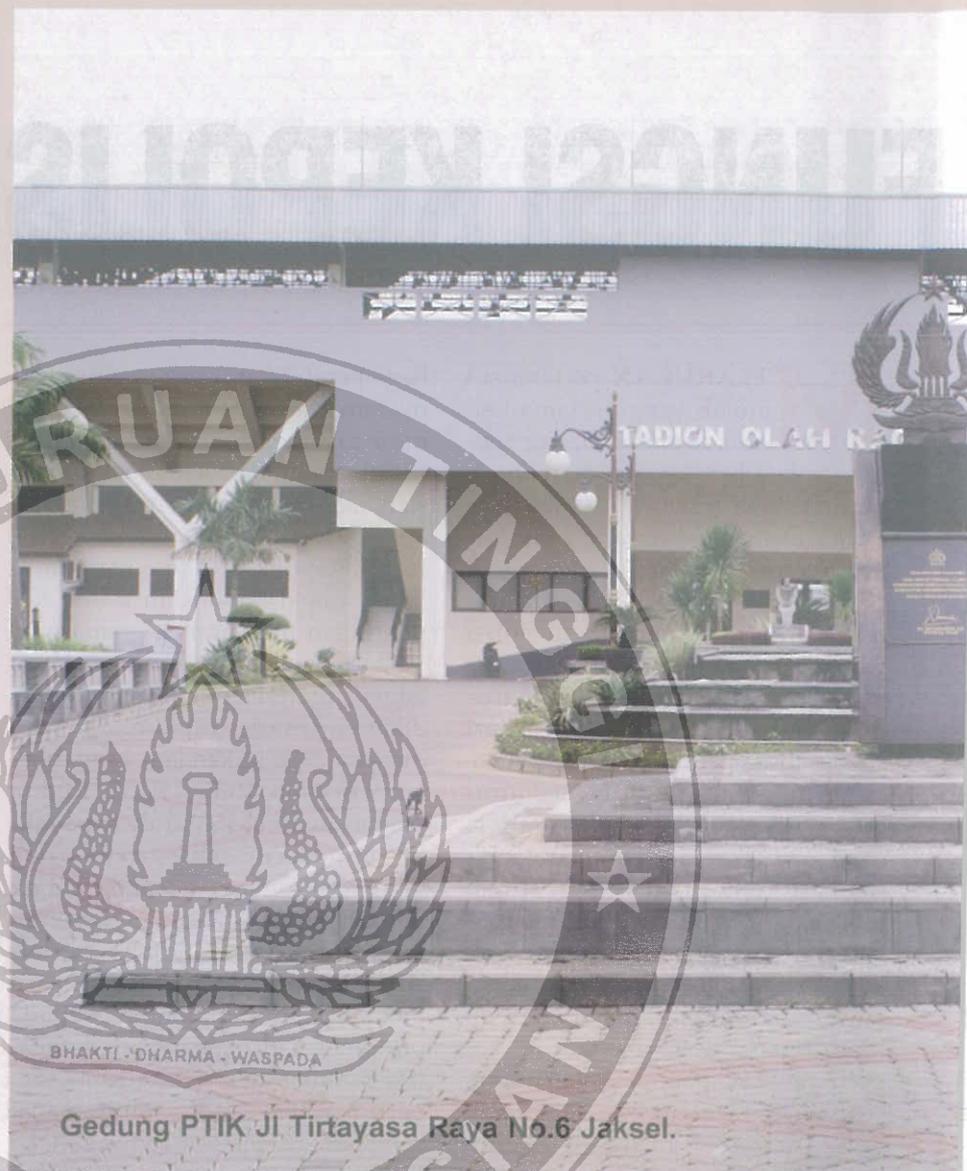
Toh bukan berarti tugas Suprapto di PTIK menjadi lebih gampang. Bagaimanapun, lanjutnya, cukup banyak kendala yang harus diatasi. Ia mencontohkan, salah satunya adalah pertimbangan pragmatis nanti kalau sudah lulus, mau disalurkan ke mana. Ia membandingkan dengan di Amerika, dimana lulusan yang tidak diterima di kepolisian, banyak perusahaan yang menampung sebagai tenaga-tenaga konsultan di bidang *industry of security*. Selain itu di Amerika juga ada detektif-detektif swasta. "Tapi di sini kan belum populer hal seperti itu. Mungkin karena kekhawatiran belum terserapnya lulusan tersebut, maka hingga saat ini belum terselenggarakan. Polisi kita saat ini masih mempromosikan hal tersebut."

PUSAT KAJIAN, STRATEGI KE DEPAN

Sebagai tokoh tertinggi di PTIK, Suprpto secara gamblang membeberkan bagaimana strategi PTIK ke depan. Menurutnya, strategi pertama adalah dengan menyempurnakan semua proses pembelajaran, mulai dari menata kurikulum, dosen. Lalu yang kedua, melengkapi fasilitas pendukung pendidikan yang ada. Misalnya perkuliahan, perputakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Secara bertahap semua ini akan dibangun. Strategi yang ke tiga adalah tetap menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan. Yang keempat adalah menjadikan PTIK sebagai pusat pengkajian perpolisian. Salah satunya adalah *community policing*, yaitu sebuah gaya pemolisian. Secara historis, gaya pemolisian itu selalu berkembang dari satu model ke model berikutnya.

Dulu, pada jaman kerajaan di Jawa, ada gaya pemolisian tradisional yang dikenal dengan nama *Joko Boyo*. Bentuknya sangat sederhana, begitu juga proses pembuktiannya. Pada jaman itu, bagi orang yang diduga bersalah harus melewati semacam 'pengujian' dengan cara dicelupkan ke dalam air mendidih. Jika tidak sakit, berarti dia benar. Tradisi seperti ini hingga sekarang masih ada, tapi dalam bentuk yang lain. Contohnya 'sumpah pocong'. Di luar yang tradisional, tentu ada pula gaya pemolisian modern. Bentuknya bermacam-macam. Ada gaya pemolisian yang bersifat represif, seperti yang dilakukan Gestavo Jerman. Juga yang dilakukan KGB, Rusia. Itu represif. Pemolisian benar-benar difungsikan sebagai intelijen bagi masyarakat. Artinya, masyarakatlah yang dijadikan sebagai objek untuk ditekan, ditindas. Semua dilakukan untuk alasan kepentingan negara.

Polri sendiri juga pernah mengalami hal semacam itu. Ada yang namanya 'reaktif policing', 'represif



'policing', seperti pada era lama dulu. Pemolisian seperti ini menempatkan masyarakat tidak sebagai mitra atau pihak yang harus dilayani. Sebaliknya, masyarakat justru diposisikan sebagai pihak yang harus dicurigai. "Nah, gaya pemolisian yang dilakukan Polri sekarang bukanlah yang seperti itu lagi, melainkan yang disebut 'proaktif policing' atau sebagai *community policing*. Artinya, pemolisian yang didasarkan pada kepentingan atau tujuan masyarakat itu sendiri," ungkap Suprpto.

Nah, elemen-elemen yang ada pada *community policing* seperti ini antara lain adanya kesetaraan antara masyarakat dengan polisi, ada forum komunikasi antara polisi dengan masyarakat. Dan harus ada pula *problem solving*, yaitu memecahkan masalah bersama. "Inilah yang kita harapkan bisa dikembangkan," ujarnya.

Pertanyaannya kemudian, apakah gaya pemolisian dari *community policing* ini sudah final? Jawabannya memang belum tentu. Mungkin ke depan ada lagi gaya yang paling ba-



FOTO: JT/EVA HARTINI

ru dan lebih ideal. Semua itu berkembang, menyesuaikan diri dengan kondisi jaman. "Dulu, pada era Pak Sanusi (Kapolri tahun 1986-1991, Red) ada yang namanya infrastruktur penanggulangan kriminalitas (IPK). Di Jawa Barat ada 'polingga' alias 'polisi lingkungan keluarga'. Nah semua ini termasuk *community policing*, artinya ada kesetaraan, ada kemitraan, dan ada *problem solving*. Sayangnya, semua itu belum dirasakan betul sebagai sebuah filosofi," papar Suprpto.

Pada dasarnya, lanjut Suprpto,

polisi dengan masyarakat itu adalah mitra. Polisi tidak berada di atas masyarakat, tapi polisi adalah pelayan masyarakat di bidang keamanan masyarakat dan penegakan hukum. Nah, dalam konteks inilah diharapkan PTIK bisa menjadi pusat kajian bagaimana langkah Polri ke depan nanti.

Jadi, secara keseluruhan, inti dari strategi PTIK sebetulnya adalah penempatan atau pemosisian lembaga PTIK itu sendiri, dan ini mencakup penataan organisasi PTIK. Di dalam organisasi besar Polri saat

ini sedang dibahas, termasuk juga strategi menyongsong ke depan nantinya seperti apa. "Untuk kepentingan itu kita sudah membuat naskah pengajak, *initial paper*, dan sudah kita distribusikan kepada para pakar untuk diminta masukannya. Nanti, pada waktu yang tepat, akan kita adakan sebuah seminar yang mengundang pakar-pakar tersebut, agar mereka bisa memberi masukan, gagasan seperti apa PTIK ke depan, berkaitan dengan upaya kita menyongsong era globalisasi dan sebagainya."

HUMAN SECURITY

Dikatakan Suprpto, PTIK tidak berdiri sendiri. PTIK merupakan sub sistem dari Sumber Daya Manusia (SDM), dan karena itu ia memberi warna bagi manajemen SDM nantinya. PTIK sebagai pencetak sarjana-sarjana kepolisian dan perwira-perwira yang berpendidikan sarjana nantinya harus mewarnai pembinaan SDM. Jadi pembinaan SDM ke arah rekrutmen harus seperti itu. Misalnya, validasi organisasi inisiatornya ada di sini, kemudian polmas inisiatornya, konseptornya, semua ada di sini. "Memang PTIK belum sempurna, tetapi saya sudah jauh melangkah ke arah itu. Misalnya dengan mengambil konsultan untuk membangun dasar PTIK ini dari *state security*, *human security*, yang semuanya mendorong pembentukan SDM di Polri yang nantinya mampu menyongsong paradigma baru dalam era globalisasi."

Suprpto menegaskan, jaman sudah berubah dan karena itu kita juga menangkap adanya sinyal perubahan paradigma keamanan. Dulu, keamanan lebih bersifat *state security* atau keamanan negara, namun sekarang bergeser ke arah *human security* (keamanan manusia atau individu). Dulu, keamanan negara solah-olah diartikan berbeda dengan keamanan individu atau hu-

man security. Keamanan negara diartikan lebih penting atau segalanya, bahkan kadang-kadang keamanan individu dikorbankan untuk kepentingan keamanan negara, "Kalau sudah seperti itu, malah kadang-kadang negara berperan sebagai sumber ancaman. Inilah yang dulu yang kita sebut sebagai pola-pola represif, negara intelijen," paparnya.

Sekarang, lanjut Suprpto, tidak seperti itu. Dengan bergeser ke arah *human security*, artinya keamanan negara merupakan akumulasi dari keamanan-keamanan individu. Dengan konsep ini, negara disebut aman jika masing-masing individu merasa aman. Artinya, aman dari berbagai hal, termasuk ancaman kelaparan, kemiskinan, gangguan kriminalitas, sampai dengan ancaman-ancaman yang tidak nyata. Contohnya di Amerika sekarang ini menerapkan proteksi terhadap *biology terrorism*, *nuclear terrorism*, dan *chemical terrorism*. Mereka menerapkan proteksi sangat keras untuk semua bentuk terorisme tersebut.

"Terorisme biologi itu prakteknya semua zat-zat organik yang masuk ke Amerika, makanan dan sebagainya, harus diuji secara kimiawi, apakah mengancam mereka apa tidak. Kalau dalam pengujian ternyata ada ancaman, itu langsung ditolak. Nah, yang kita sebut sebagai *human security* ya termasuk proteksi seperti itu. Jadi negara dikatakan aman kalau tiap-tiap individu itu merasa aman. Dengan kata lain, paradigma yang melahirkan keniscayaan Polri juga harus berubah. Berubah dari aparat negara, aparat pemerintah, ke arah aparat yang melindungi tiap-tiap individu masyarakat. Jadi, ke depannya nanti kita bangun polisi yang humanis yang sangat familiar dengan masyarakat, familiar dengan individu-individu masyarakat. Polisi yang tidak berada di atas langit tapi membumi bersama ma-

sarakat/ Polisi yang tidak bersembunyi di kantor tetapi bersama-sama dengan individu masyarakat. Dan, polisi seperti ini harus humanis."

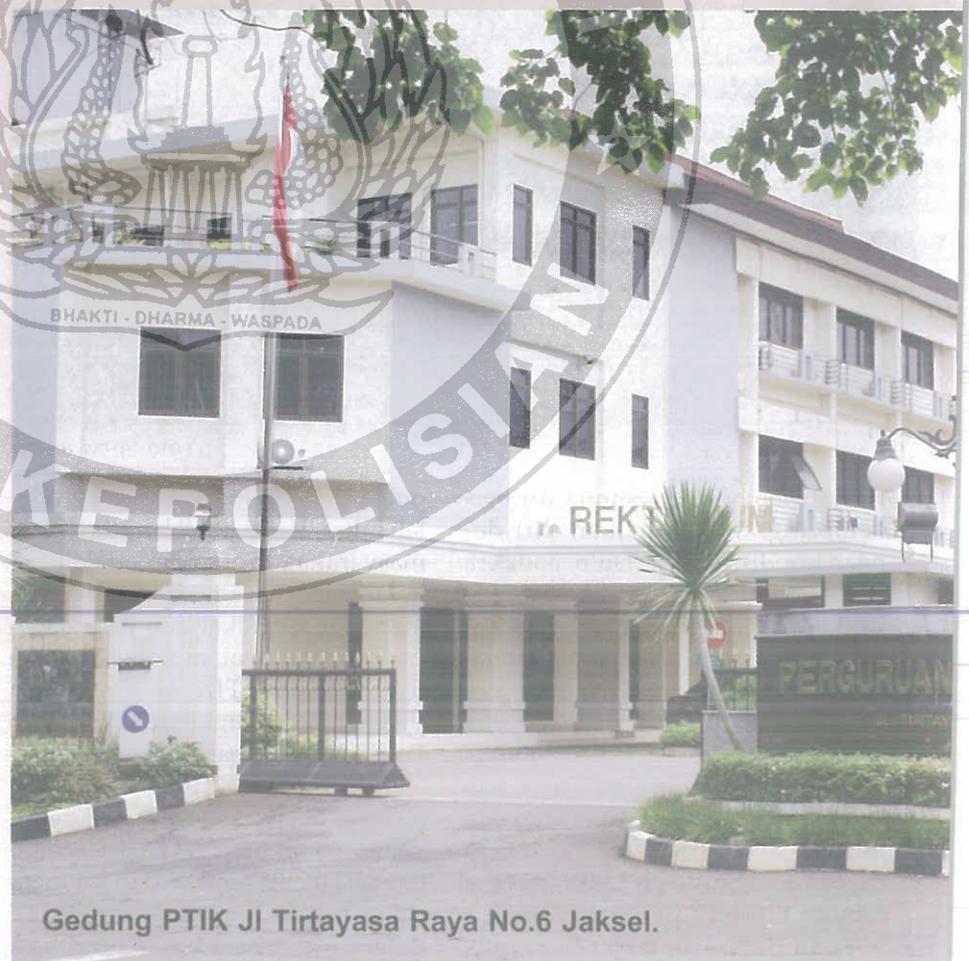
Oleh karena itu, lanjut Suprpto, keterampilan komunikasi sosial benar-benar harus disampaikan dan dilatihkan kepada masyarakat. "Mungkin ke depan nanti polisi yang (mampu) tersenyum itu jadi ukuran untuk menjadi polisi atau tidak. Jika tidak bisa tersenyum atau senyumnya tidak tulus itu bisa kita rekomendasikan untuk tidak menjadi polisi. Ke depan nanti harus seperti itu, harus humanis," tandasnya.

MEMPERTEMUKAN TEORI DAN PRAKTIK

Dalam hal akreditasi, menurut Suprpto, sebetulnya saat ini PTIK

sudah mendapatkan nilai A, atau setara dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) dan fakultas lain yang juga terakreditasi A. "Sudah ada skep dari Mendiknas soal ini," ujarnya.

Dalam pendidikannya, lanjut Suprpto, PTIK menerapkan dua program studi, yaitu bidang Binkam dan Gakkum. Masing-masing memiliki mata pelajaran yang spesifik. Namun, secara umum kurikulum yang dikembangkan di sini meliputi 4 kelompok besar, yaitu kelompok ilmu sosial (misalnya antropologi, psikologi, sosiologi, kriminologi dsb); kelompok ilmu hukum (pidana, perdata, hukum internasional); kelompok ilmu-ilmu manajemen, kepemimpinan (SDM, informasi, logistic, dan sebagainya); dan



Gedung PTIK Jl Tirtayasa Raya No.6 Jaksel.

kelompok ilmu-ilmu pendukung (mencakup forensik, identifikasi kimia forensik, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan lain-lain). Semua ini merupakan konten dari ilmu kepolisian.

Selain ilmu kepolisian, PTIK juga memiliki muatan khusus. Karena selain sebagai sarjana ilmu kepolisian, lulusannya memiliki kompetensi manajer tingkat menengah. Selain ilmu-ilmu murni, di PTIK juga diajarkan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya teknis kepolisian. "Pada dasarnya kompetensinya adalah, pertama, lulusan PTIK harus menguasai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian, memahami, menghayati dan seterusnya tentang masalah-masalah kepolisian. Kedua, mampu mener-

apkan kompetensi kepolisian. Yang ketiga, mampu mengembangkan ilmu kepolisian melalui penelitian ilmu-ilmu kepolisian. Dan keempat, sebagai manajer tingkat menengah," ujar Suprpto.

Cara pandang seorang intelektual dengan yang di lapangan, menurut Suprpto, adalah bagaimana menyikapinya dengan cara menjembatannya. Karena, sekali lagi, yang diajarkan di PTIK tidak hanya ilmu-ilmu murni tapi juga pengetahuan teknis kepolisian yang sifatnya aplikatif, taktik teknis dan lainnya. "Nah, di situlah dipertemukan antara teori dengan kenyataan lapangan, kemudian dosen-dosennya juga yang diundang adalah dosen dari praktisi-praktisi, seperti reserse Mabes Polri, sehingga ketemu antara teori dengan praktik.

FOTO: UT/EVA HARTINI

INGINKAN KOMPETITOR

Di sisi lain, Suprpto mengakui saat ini PTIK bisa dibilang tak memiliki kompetitor. Padahal, lanjutnya, keberadaan kompetitor justru diperlukan untuk membuat PTIK berkembang lebih baik. Pendidikan yang tidak memiliki kompetitor akan ketinggalan. "Lebih baik kita sekolahkan saja di UI, misalnya. Karena, di UI berkembang pesat ilmu ilmu forensik. Kalau Polri yang mengembangkan sendiri di sini (PTIK), maka akan ketinggalan dan tidak efisien. Begitu pula dengan ilmu ilmu yang lain. Karena itu ke depan seharusnya pejabat-pejabat di lingkungan Polri tingkatnya sudah ahli. Gubernur PTIK misalnya, mestinya bergelar Prof. DR. Lalu Kadiv Humas idealnya Doktor di bidang komunikasi, Kabareskrim idealnya Doktor di bidang hukum. Juga pejabat tinggi yang lain. Inilah yang harus kita capai ke depan," ungkapnya.

PTIK, pria yang tak merokok ini, saat ini sedang mencoba merintis untuk mendidik sarjana dengan strata yang lebih tinggi. Di PTIK, lu-

lusan S1 dan S2 sudah banyak tersebar. Tetapi ke depan tidak hanya S2 kepolisian saja yang kita kembangkan tetapi juga S2 dan S3 di semua bidang ilmu, yang berhubungan dengan Polri. "Warna akademis ini harus mulai bergulir. Jadi seperti bola salju yang semakin lama makin besar dan besar. Sehingga, bila perlu nantinya Kapolda-Kapolda adalah doktor-doktor. Idealnya seperti itu," papar pehobi tanaman dan membaca buku ini.

Kendati bisa dibilang PTIK tak mempunyai kompetitor, kata Suprpto, yang penting adalah kesadaran untuk mengubah citra dan perilaku. "Walaupun ada kompetitor, kalau kita tidak mau mengubah citra dan perilaku, maka bisa jadi suatu saat tugas-tugas kepolisian akan diambil alih oleh instansi lain. Untuk itu kita harus berani berubah. Kalau tidak, jangan salahkan nanti kita tidak dikasih kerjaan, tidak diberi wewenang kecuali hanya menjaga keamanan saja. Jangan salahkan masyarakat dan DPR, kalau kita begitu."

Soal hambatan, lanjut Suprpto, pasti ada. Karena, pada dasarnya polisi itu adalah bayang-bayang dari masyarakat. "Police is a shadow of society. Yang namanya masyarakat, pasti ada yang masih suka melakukan pelanggaran, menyimpang, dan mereka pasti akan berusaha untuk mempengaruhi polisi dengan melakukan penyuapan, pungli, dan lain sebagainya. Bayangkan jika seorang anggota lalu-lintas yang punya tugas khusus patroli di lapangan, karena gaji yang kecil dan tidak memiliki rumah dinas maupun kendaraan dinas padahal ia sudah punya istri dan anak, apa bisa tahan terhadap godaan penyuapan? Kondisi seperti ini bisa mendorongnya melakukan hal yang menyimpang, apalagi didukung oleh masyarakat yang masih berperilaku menyimpang. Itulah hambatannya," tandasnya. [cil/eva]

